

IMPLIKASI PELANGGARAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Kuswan Hadji¹, Yulianisa Amelia Fasya², Salsabila Phytagora Athariq³, Kharisma Ika Nurkhasanah⁴, Rahil Syira Roudhlotul Janah⁵, Kania Putri Riyandra⁶
kuswanhadji@untidar.ac.id¹, yulianisaamelia3@gmail.com², phytagora21@gmail.com³,
kharismaika07@gmail.com⁴, rahilsyira11@gmail.com⁵, kaniaputririyandra@gmail.com⁶
Universitas Tidar

Abstrak: Pelanggaran kode etik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dan berdampak signifikan terhadap sistem politik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran kode etik yang terjadi di DPR dan mengungkap faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran tersebut. Penelitian ini juga menganalisis dampak dari pelanggaran kode etik terhadap stabilitas politik dalam pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan tindakan DPR yang melanggar kode etik DPR dan membandingkan ketentuan hukum yang ada dengan praktik legislasi DPR, serta mengkaji pandangan para ahli hukum mengenai legitimasi dan otoritas DPR. Penelitian ini menemukan bahwa adanya pelanggaran kode etik yaitu mengedepankan kepentingan individu dan penyalahgunaan wewenang. Dampak dari pelanggaran ini sangat serius, mulai dari menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sehingga menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini, termasuk penguatan pengawasan, reformasi sistem politik, dan peningkatan kesadaran anggota DPR akan pentingnya etika dalam berpolitik.

Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik, DPR, Kewenangan.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan sistem pemerintahan dan kepentingan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam bernegara wajib berlandaskan pada hukum yang berlaku, hal ini berkesesuaian dengan yang terkandung dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum dan menganut prinsip demokrasi, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat menjadi salah satu faktor penting, dimana lembaga Dewan Perwakilan Rakyat terlibat dalam pembuatan keputusan politik yang berfungsi sebagai pihak yang mewakili masyarakat.

Menurut beberapa pendapat, cara yang paling efektif untuk menciptakan pemerintahan yang representatif adalah melalui sistem perwakilan. Ada hubungan antara wakil dan yang diwakili ketika seseorang dipilih atau diangkat menjadi anggota lembaga perwakilan. Hubungan antara yang diwakili dan yang mewakili adalah definisi dari perwakilan itu sendiri. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat, wakil diberi wewenang untuk melakukan sejumlah kegiatan.

Etika dapat didefinisikan menjadi sebuah sopan santun atau kesusilaan, sehingga dapat disimpulkan etika memiliki makna mengenai suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan perilaku dari seseorang yang berkaitan dengan perilaku positif dan perilaku negatif. Frans Magni Suseno (1987) menyatakan bahwa etika merupakan sebuah ilmu, bukan merupakan sebuah ajaran yang menyatakan perbedaan tingkatan etika dan ajaran moral. etika politik merupakan norma moral serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perilaku politik. berkaitan dengan integritas, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan politik. etika politik dari suatu bangsa dibangun dengan karakteristik bangsa yang berlandaskan pada pancasila. (Mahendra, 2016). Anggota dewan perwakilan rakyat sudah semestinya memiliki kompetensi dasar yang menjadikan pancasila sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan segala aktivitas yang berkaitan dengan tugas nya.

kode etik merupakan norma yang semestinya ditaati oleh setiap anggota dewan perwakilan rakyat selama melaksanakan tugas dan kewenangannya yang bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas. namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa tindakan yang mencerminkan etika politik yang baik. masih terdapat beberapa tindakan yang mengedepankan kepentingan kelompok dan individu daripada kepentingan masyarakat. (Yunus, 2014). permasalahan-permasalahan tersebut tentunya dapat mengganggu keseimbangan dari martabat, kehormatan dan citra dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai etika dari salah satu lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, bentuk pelanggaran kode etik dan mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran tersebut. penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak dari adanya pelanggaran kode etik terhadap stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dan dengan pendekatan analisis doktrinal. Metode normatif bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan tindakan DPR yang melanggar kode etik. Dalam konteks ini, fokus utama penelitian adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh DPR beserta alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut dan implikasi dari pelanggaran tersebut yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan DPR terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, serta konsekuensi hukum yang mungkin

timbul dari pelanggaran tersebut terhadap sistem politik di Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan analisis doktrinal, akan membandingkan ketentuan hukum yang ada dengan praktik legislasi DPR, serta mengkaji pandangan para ahli hukum mengenai legitimasi dan otoritas DPR. Melalui penelitian normatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang implikasi hukum dari pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh DPR serta dampaknya terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DPR dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran

Norma atau pedoman yang menjadi dasar landasan dengan aturan perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang perlu, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota organisasi atau individu dalam profesi tertentu dikenal sebagai kode etik. Kode etik akan menjunjung tinggi martabat dan reputasi dari suatu institusi atau organisasi, meningkatkan kredibilitas, dan mengarahkan profesi. Adapun regulasi yang mengatur mengenai tersebut diatur sebagaimana dalam Peraturan DPR RI No. 1/2015 tentang Kode Etik DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga yang sangat penting dalam suatu negara.

DPR bertanggung jawab atas penyusunan anggaran, legislasi, pengawasan pemerintah, dan memenuhi keinginan rakyat. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, pemilihan umum nasional diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih setiap anggota DPR. Karena DPR telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat yang memilihnya, maka setiap anggota DPR wajib menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR dengan menaati kode etik yang berlaku selama menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UU No. 1/2015, dikarenakan DPR mengemban amanah dari rakyat sehingga untuk menjaga kepercayaan merek yaitu dengan menjaga kehormatan, kredibilitas, citra dan dan martabat DPR dengan upaya mematuhi segala bentuk kode etik yang berlaku dalam menjalankan tugas.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sorotan publik dan media dalam beberapa tahun terakhir karena prestasi, kinerja, dan pelanggaran etika yang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan terhadap kepatuhan anggota DPR terhadap kode etik untuk mengurangi pelanggaran yang dapat merusak reputasi DPR. Selama periode 2014-2015, setidaknya 19 anggota DPR terlibat dalam kasus pidana pemukulan, intimidasi, dan penipuan, serta 38 anggota DPR terlibat dalam pelanggaran pemilu, termasuk tuduhan politik uang dan pemasangan APK sebelum masa tenang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak selalu memiliki reputasi positif atas perilaku mereka. Karena tingkat kehadiran yang rendah, korupsi, dan lain sebagainya, anggota DPR masih dipandang negatif oleh sebagian besar masyarakat. Terkait dengan korupsi, data KPK menunjukkan bahwa antara tahun 2004 hingga 2020, sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) anggota DPR dan DPRD terlibat dalam kasus korupsi. Angka ini menempatkan anggota DPR dan DPRD di posisi kedua dari profesi/jabatan yang terlibat korupsi, setelah sektor swasta (308). Pelanggaran kode etik ini menunjukkan tingkat moralitas politik yang terlibat dalam masalah politik dan hukum yang dihadapi banyak anggota DPR.

Dari beberapa pelanggaran kode etik tersebut, tentunya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pelanggaran tersebut terjadi, beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu:

1. Kurangnya rasa kejujuran dan integritas dari anggota DPR

Tidak jarang anggota DPR yang hanya mengedepankan kepentingan individu diatas kepentingan kelompok, dengan rendahnya kejujuran dan integritas yang dimiliki oleh

anggota DPR memberikan peluang terjadinya pelanggaran terhadap kode etik seperti adanya korupsi, pelanggaran etika, pelanggaran pada saat masa pemilu, dan banyak lainnya.

2. kurangnya tanggung jawab dan kurang memahami mengenai tugas dan peranan sebagai anggota DPR

Ketidakmampuan menjaga disiplin dan komitmen juga turut serta mendorong terjadinya pelanggaran terhadap kode etik, anggota DPR yang kurang bertanggungjawab dan memahami tugas dan perannya tentunya akan menimbulkan banyak tindakan yang akan membawa dampak negati di kehidupan masyarakat.

3. Kepentingan politik

Tidak jarang terjadi anggota DPR yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik dan citra anggota DPR hanya untuk kepentingan mempertahankan posisi dan dukungan, beberapa hal yang mereka lakukan seperti dengan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan jabatan dengan melakukan praktik money politik dan pelanggaran-pelanggaran lain pada saat masa kampanye. Tindakan tersebut tidak hanya menghanbcurkan citra dan kredibilitas lembaga legislatif tetapi juga menjadi langkah awal maraknya korupsi.

Dari beberapa faktor tersebut tentunya masih banyak lagi hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran kode etik, baik faktor internal maupun eksternal anggota DPR, yang menjadi perhatian adalah dimana pelanggaran tersebut membawa banyak dampak negatif bagi masyarakat dan membawa dampak negatif bagi lembaga legislatif karena dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut tentunya merusak citra dan mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap lembaga legislatif yang ada.

Pengaruh Pelanggaran Kode Etik DPR terhadap Stabilitas Politik dan Pemerintahan di Indonesia

Politik dan pemerintahan itu tidak dapat dipisahkan, keduanya memiliki hubungan erat dan saling berkaitan. Pemerintahan tidak akan berjalan tanpa adanya politik yang menjadi wadah ataupun ruang untuk demokrasi. DPR sebagai salah satu lembaga legislatif memiliki peran penting dalam menggerakkan roda politik di Indonesia. DPR melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran menjadi representasi suara rakyat dalam sistem demokrasi. Para anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan nasional.

Stabilitas politik dan pemerintahan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pelanggaran Peraturan Etik DPR. Ketika anggota DPR melakukan pelanggaran kode etik, hal itu dapat menimbulkan berbagai dampak serius terhadap stabilitas politik dan pemerintahan nasional. Kode Etik DPR merupakan kumpulan pedoman yang dirancang untuk menegakkan kejujuran, profesionalisme, dan kepercayaan publik anggota DPR. Sanksi pelanggaran Kode Etik oleh anggota DPR tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga mengancam kredibilitas sistem demokrasi secara menyeluruh. Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat terganggu jika anggota DPR melanggar Kode Etik. Opini negatif muncul dan lembaga DPR kehilangan kredibilitas ketika publik mengamati atau mengetahui skandal yang melibatkan personel DPR. Publik dapat menjadi tidak tertarik dan apatis sebagai akibatnya, yang akan merugikan demokrasi partisipatif yang kuat.[5]

Ketidakstabilan politik sering kali muncul sebagai akibat dari pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pejabat publik. Seringkali media massa dan partai oposisi memanfaatkan skandal serta pelanggaran tersebut untuk mengkritik pemerintahan dan partai politik yang mendukung kebijakan tertentu. Situasi ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, sehingga kesepakatan mengenai isu-isu penting, seperti kebijakan ekonomi, reformasi hukum, dan persetujuan anggaran, menjadi sulit dicapai.[6] Akibatnya, kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi masyarakat dapat terganggu oleh kerusuhan politik yang berkepanjangan.

Pelanggaran kode etik oleh anggota DPR dapat berdampak terhadap stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia. Ketika anggota DPR, yang seharusnya menjadi representasi rakyat, terlibat dalam pelanggaran etik, hal itu dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan memicu ketidakpuasan masyarakat. Selain itu, pelanggaran kode etik dapat menyebabkan ketegangan politik dan mengganggu kelancaran proses legislasi, yang berdampak pada efektivitas pemerintahan. Dengan dasar hukum yang jelas dan proses penegakan yang transparan, diharapkan pelanggaran kode etik bisa diminimalisir dan stabilitas politik serta pemerintahan dapat terjaga.

Kemudian pelanggaran kode etik juga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Ketika anggota DPR terlibat dalam tindakan yang tidak etis atau ilegal, seperti korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang, pemerintahan yang baik dan bersih menjadi sulit dicapai. Reformasi birokrasi dan kebijakan antikorupsi bisa terhambat, karena orang-orang yang seharusnya mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut justru terlibat dalam pelanggaran. Ini menciptakan siklus ketidakpercayaan dan kegagalan pemerintahan yang dapat memperburuk stabilitas politik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik di kalangan anggota DPR, seperti mengedepankan kepentingan individu dan penyalahgunaan wewenang, memiliki dampak serius terhadap stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia. Ketika wakil rakyat memprioritaskan keuntungan pribadi di atas kepentingan publik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif menurun drastis. Kepercayaan merupakan fondasi penting bagi legitimasi institusi demokratis; ketika itu menurun, maka terjadi krisis legitimasi yang berpotensi besar mengganggu harmoni politik dan menumbuhkembangkan rasa apatisme dalam masyarakat. Dalam konteks ini, stabilitas politik terganggu karena masyarakat mulai meragukan kemampuan dan niat baik dari para wakil mereka.

Dampak negatif dari penurunan kepercayaan publik ini tidak hanya berhenti pada aspek persepsi, tetapi juga meluas ke hambatan konkret dalam proses pengambilan keputusan yang efektif di pemerintahan. Semakin rendah tingkat kepercayaan publik, semakin sulit pula bagi DPR untuk mendapatkan dukungan sosial dan politik yang diperlukan guna mewujudkan kebijakan-kebijakan penting. Ketika anggota DPR lebih fokus pada kepentingan individu, kolaborasi antara partai dan lembaga pemerintahan lainnya dapat terhambat, memperlambat proses legislatif dan mengakibatkan keputusan yang perlu segera diambil menjadi tertunda. Kelambanan ini bisa berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi negara, mengingat kebijakan publik yang tidak diimplementasikan tepat waktu dapat menghambat pertumbuhan pembangunan dan pengelolaan negara yang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi pelanggaran kode etik di kalangan anggota DPR. Penguatan pengawasan melalui lembaga seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu ditingkatkan agar pengawasan berjalan lebih efektif dan transparan. Reformasi sistem politik juga harus diupayakan, misalnya dengan memperketat syarat-syarat pencalonan anggota DPR untuk memastikan bahwa hanya individu yang berkualitas dan berintegritas yang dapat menduduki posisi tersebut. Selain itu, pendidikan dan peningkatan kesadaran etis bagi anggota DPR harus menjadi prioritas, untuk menanamkan pemahaman bahwa etika dalam politik bukan hanya norma abstrak, tetapi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang berfungsi dengan baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Selain itu, pelanggaran kode etik di DPR juga menciderai semangat checks and balances dalam sistem pemerintahan. DPR memiliki peran penting sebagai mitra eksekutif dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Ketika kecenderungan pelanggaran kode etik meningkat, bisa jadi terjadi pelemahan fungsi pengawasan DPR

terhadap eksekutif, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan praktik pemerintahan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Pelanggaran ini akan merusak fungsi sistemik pemerintahan demokratis yang seharusnya berjalan secara seimbang dan adil.

Solusi dari permasalahan ini adalah penerapan dan penegakan kode etik secara ketat dan menyeluruh. Kode etik harus diterapkan tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai norma yang dijunjung tinggi melalui pendidikan etika politik bagi anggota DPR. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat, serta harus ada komitmen dari semua pihak untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi legislatif. Dengan demikian, menjaga integritas kode etik DPR adalah kunci untuk memastikan stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia. Keberhasilan dalam melakukan ini akan tergantung pada komitmen kolektif untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Kode etik adalah norma atau aturan kesatuan yang berlandaskan etika dengan aturan tingkah laku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak pantas dilakukan oleh anggota suatu lembaga atau orang yang memiliki profesi tertentu. Kode etik akan menjaga kehormatan dan nama baik suatu lembaga atau organisasi, meningkatkan kredibilitas dan menjadi pedoman profesi. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga terpenting dalam sebuah negara. Pelanggaran terhadap kode etik DPR memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik dan pemerintahan di Indonesia. Kode etik DPR adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan publik terhadap anggota DPR. Ketika anggota DPR melanggar kode etik, konsekuensi yang muncul bisa sangat kompleks dan berpotensi merusak fondasi sistem politik yang sudah dibangun. Pelanggaran kode etik oleh anggota DPR dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Kepercayaan publik adalah aset berharga dalam sistem demokrasi. Ketika masyarakat menyaksikan atau mendengar tentang skandal yang melibatkan anggota DPR, persepsi negatif muncul dan mengakibatkan menurunnya legitimasi lembaga tersebut. Hal ini bisa menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan kurang tertarik untuk terlibat dalam proses politik, yang pada gilirannya merusak demokrasi partisipatif yang sehat.

Pelanggaran kode etik dapat memicu destabilisasi politik. Skandal atau pelanggaran yang terungkap sering kali menjadi bahan bakar bagi oposisi politik serta media untuk menyerang pemerintah atau partai yang mendukung kebijakan tertentu. Dampak dari destabilisasi politik adalah sulitnya mencapai konsensus dalam berbagai kebijakan kritis, seperti pengesahan anggaran, reformasi hukum, dan kebijakan ekonomi. Ketidakstabilan politik ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Saran

DPR merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam sistem politik Indonesia. Integritas dan profesionalitas anggota DPR menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Namun, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sebagian anggota sering kali mencoreng nama baik DPR dan melemahkan kepercayaan masyarakat. Artikel ini membahas bentuk pelanggaran kode etik dan akibatnya terhadap stabilitas politik. Pelanggaran kode etik tidak hanya merugikan DPR sebagai lembaga, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia, kehilangan kepercayaan publik, destabilisasi politik, dan kerugian sosial ekonomi muncul akibat kurangnya pemahaman nilai-nilai etika yang cenderung permisif terhadap perilaku tidak etis.

Pelanggaran kode etik DPR adalah masalah serius yang dapat merusak stabilitas politik dan melemahkan demokrasi. Dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan kesadaran etika, dan menerapkan sanksi yang tegas, DPR dapat memulihkan kepercayaan

publik dan membangun demokrasi yang lebih sehat. Kepercayaan masyarakat adalah aset yang harus terus dijaga, dan itu hanya dapat dicapai jika DPR mampu menjaga integritas dan kredibilitasnya sebagai lembaga legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Imania, D., Saraswati, R., & Asy'ari, H. (2016). Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-16.
- Islamy, A. (2020). Paradigma Sosial Profetik dalam Kode Etik Politik di Indonesia. *ASY SYAR'ITYYAH: JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM*, 5(2), 155-179.
- Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753-10760.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya